



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. KHA. Dahlan Nomor 01 Lamongan Kode Pos 62214

Telp. (0322) 321414 Fax : 322603

Web Site : www.lamongankab.go.id/bapenda

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target tahun 2021 beserta analisisnya, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja kedepan.

Akhir kata, kami berharap dengan disusunnya Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini, akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Lamongan, 14 Januari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

A. FARIKH, SH. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670516 199602 1 00

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
C. Data Umum Organisasi.....	10
D. Sistematika Pelaporan	19
 Bab II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis	20
1. Visi	21
2. Misi	21
3. Tujuan	22
4. Sasaran	23
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)	23
B. Rencana Kerja	24
C. Perjanjian Kinerja	29
 Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja Organisasi	34
1. Pencapaian Kinerja	34
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya	43
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d. Akhir Periode RPJMD/Renstra	44
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	45
5. Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan	47

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Pencapaian Kinerja	49
B. Realisasi Anggaran	52
 Bab IV PENUTUP	 61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	11
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	13
Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana	14
Tabel 1.5 Anggaran	17
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
Tabel 2.2 Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	25
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Eselon II	29
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Eselon III	30
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Eselon IV	31
Tabel 3.1 Capaian Kinerja	35
Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	39
Tabel 3.3 Jumlah Wajib Pajak	40
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	43
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan sampai dengan akhir periode RPJMD/Renstra	44
Tabel 3.6 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Lamongan	45
Tabel 3.7 Derajat Desentralisasi Fiskal Secara Nasional	46
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	46
Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	48
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Program	49
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Kegiatan	50
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sub Kegiatan	51
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi	9
Gambar 1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	11
Gambar 1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..	12
Gambar 1.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	13
Gambar 3.1. Grafik Nilai IKM	43
Gambar 3.2. Grafik Realisasi Anggaran	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), serta dalam rangka menuju Reformasi Birokrasi sebagai salah satu tuntutan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Atas dasar tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan yang salah satunya diwujudkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah di bidang keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam

menyelenggarakan sebagian tugas Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, khususnya berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan ini, diharapkan dapat:

1. Mendorong Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan baik dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Terciptanya pelayanan publik yang akuntabel, jelas, mudah dan transparan;
3. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat Kabupaten Lamongan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Bupati Nomor 188 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan kami mempunyai fungsi :

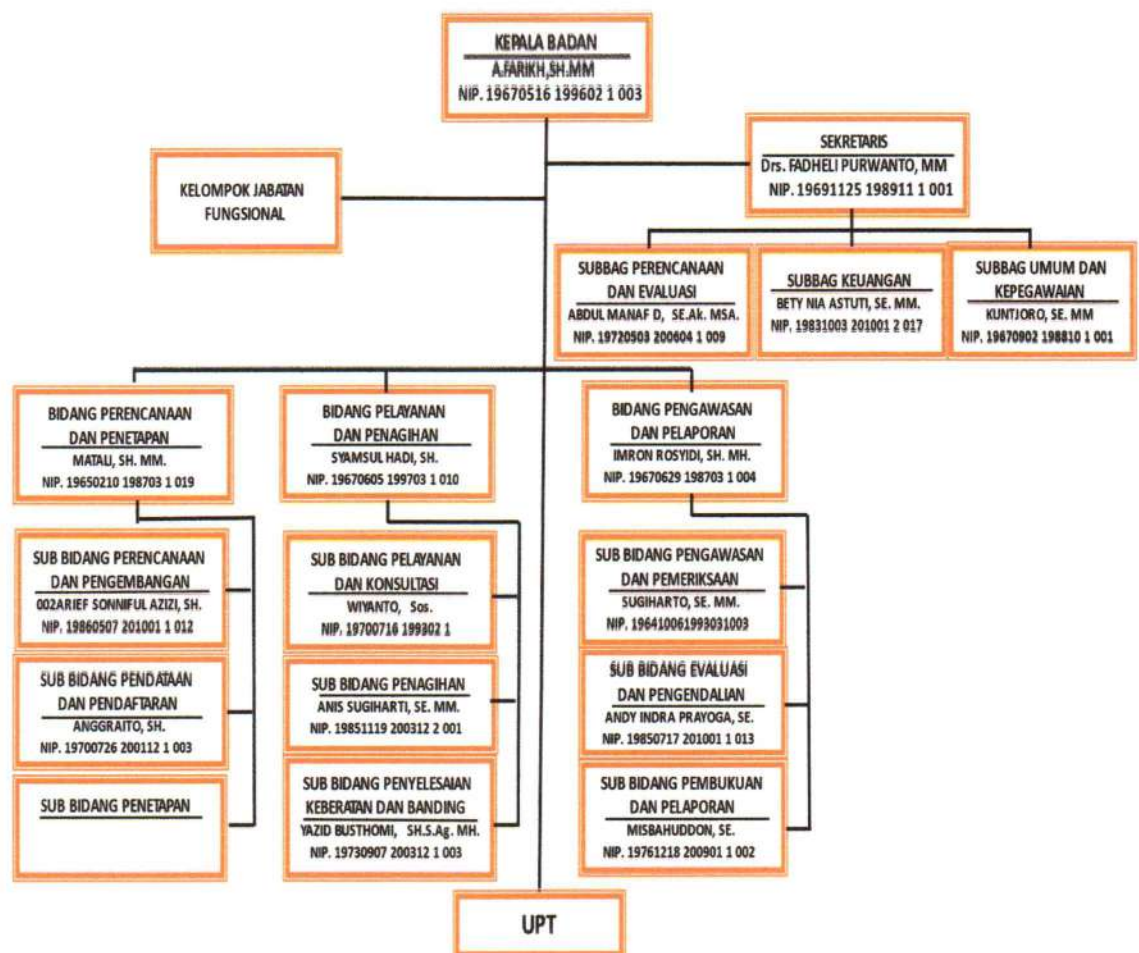
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Perencanaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah;
4. Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pendapatan Daerah;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah; dan
6. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan dan Penetapan;
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
 - b. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - c. Seksi Penetapan.
4. Bidang Pelayanan dan Penagihan;
 - a. Seksi Pelayanan dan Konsultasi;
 - b. Seksi Penagihan;
 - c. Seksi Penyelesaian Keberatan dan Banding.
5. Bidang Pengawasan dan Pelaporan;
 - a. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
 - c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan



Adapun penjabaran tugas Sekretariat dan masing-masing Bidang berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Badan.

2. Bidang Perencanaan dan Penetapan

Memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Perencanaan dan Penetapan.

3. Bidang Pelayanan dan Penagihan

Memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Pelayanan dan Penagihan.

4. Bidang Pengawasan dan Pelaporan

Memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Pengawasan dan Pelaporan.

C. Data Umum Organisasi

1. Personil

Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2021 sebanyak 67 orang, dengan perincian kondisi riil

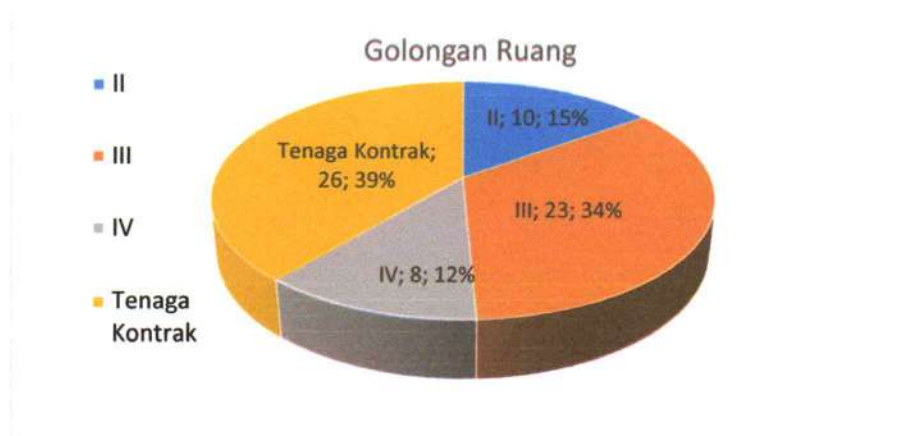
pegawai berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin adalah sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Tahun 2021

No	Golongan Ruang	Jumlah
1	I	-
2	II	10
3	III	23
4	IV	8
5	Tenaga Kontrak	26
Total		67

Gambar 1.2

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Tahun 2021



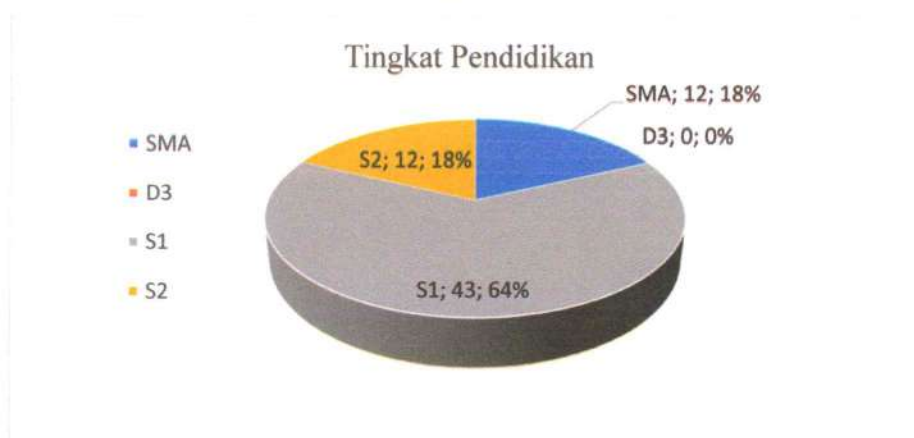
Jika dilihat dari tabel dan grafik di atas jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang terbesar adalah golongan III berjumlah 23 orang (34%)

selanjutnya golongan IV berjumlah 8 orang (12%), golongan II berjumlah 10 orang (15%), adapun untuk tenaga kontrak berjumlah 26 orang (39%)

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMA	12
2	D3	-
3	S1	43
4	S2	12
Total		67

Gambar 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

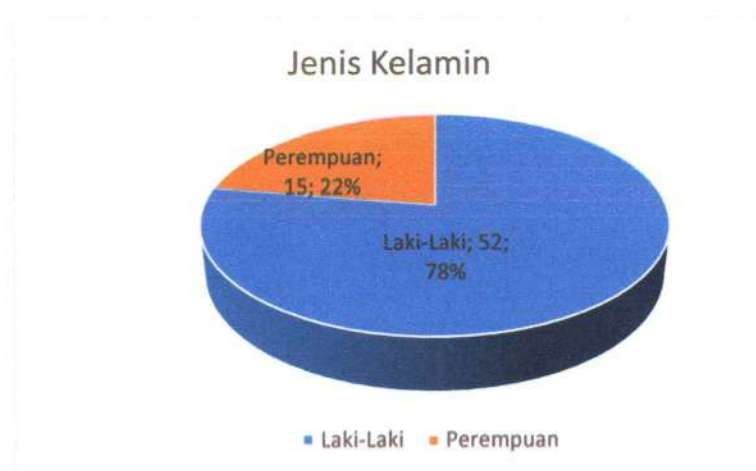


Jika dilihat dari tingkat Pendidikan, persentase terbesar adalah pegawai dengan tingkat S1 berjumlah 43 orang atau 64%, selanjutnya tingkat S2 berjumlah 12 orang (18%), SMA berjumlah 12 orang atau (18%) dan terakhir D3 berjumlah 0 orang (0%).

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	52
2	Perempuan	15
Total		67

Gambar 1.4
Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2021



Jika dilihat dari tabel dan grafik di atas jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dengan persentase terbesar adalah pegawai laki-laki berjumlah 52 orang atau 78%, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 15 orang atau 22%.

2. Sarana dan Prasarana

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pada Tahun 2021 memiliki Sarana dan Prasarana penunjang dan merupakan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4

Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2021

No	Nama	Jumlah (Unit)
1	AC Split (AC Split)	15
2	Alat Pemadam /Portable (Alat Pemadam/Portable)	2
3	Band Kas (Band Kas)	2
4	Battery Charger (Battery Charger)	1
5	Camera + Attachment (Camera + Attachment)	12
6	Camera Video (Camera Video)	1
7	Dispenser (Dispenser)	3
8	Facsimile (Facsimile)	1
9	Filling Besi/Metal (Filling Besi / Metal)	20
10	Gucci (Gucci)	2
11	Hard Disk (Hardisk)	4
12	HDD External (external)	4
13	Kipas Angin (Kipas angin)	2
14	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II (Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II)	2
15	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III (Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III)	2
16	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	14
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon II (Kursi Kerja Pejabat Eselon II)	2

18	Kursi Kerja Pejabat Eselon III (kursi kerja 3)	10
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (kursi kerja 4)	6
20	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	15
21	Kursi Putar (Kursi Putar)	10
22	Kursi Rapat (Kursi Rapat)	100
23	Kursi tamu (Kursi Tamu)	9
24	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II (Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II)	4
25	Lain-lain (Lain-lain)	26
26	Lain-lain (LCD (Proyektor))	1
27	Lain-lain (Meja kerja)	6
28	Laptop (Laptop)	3
29	Layar Film (Layar Film)	1
30	Lemari Besi (Lemari Besi)	7
31	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi/Metal)	30
32	Lemari Es (Lemari Es)	1
33	Lemari Kayu (Lemari Kayu)	10
34	Lemari Sorok (lemari sorok)	4
35	Mainframe (Mainframe)	1
36	Meja kayu/Rotan (Meja Kayu / Rotan)	2
37	Meja Kerja Pegawai Non struktural (Meja Kerja Pegawai Non Struktural)	37
38	Meja Kerja Pejabat Eselon II (Meja Kerja Pejabat Eselon II)	2
39	Meja Kerja Pejabat Eselon III (Meja Kerja Pejabat Eselon III)	15
40	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Pejabat Eselon IV)	23
41	Meja Rapat (Meja Rapat)	2
42	Meja Rapat Pejabat Eselon II (Meja Rapat Pejabat Eselon II)	1
43	Meja Resepsionis (Meja Resepsion)	2
44	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II (Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II)	1

45	Meja Tulis (Meja Tulis)	7
46	Mesin Absensi (Mesin Absensi)	1
47	Mesin Calculator (Mesin Calculator)	3
48	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1
49	Monitor (Monitor)	4
50	Notebook (Notebook)	38
51	Overhead Projector (LCD)	1
52	P.C. Unit (P.C. Unit)	43
53	Pesawat Telepon (Pesawat Telepon)	2
54	Printer (Printer)	14
55	Proyektor + Attachment (Proyektor + Attachment)	3
56	Rak Kayu (Rak Kayu)	5
57	Scanner (Scanner)	7
58	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	24
59	Server (Server)	1
60	Sofa (Sofa)	5
61	Sound System (Sound Sistem)	2
62	Station Wagon (Station Wagon)	7
63	Televisi (Televisi)	3
64	Tustel (Tustel)	3
65	Video Audio Jack Panel (Lain - lain)	5
66	White Board (White Board)	1
Grand Total		598

Sumber: Kartu Inventaris Bapenda, 2021

3. Pembiayaan

Pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 16.209.591.681,00. Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program dan 8 kegiatan dan 35 sub kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.5
Anggaran Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2021

A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.900.805.181,00
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.474.594.981,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.434.594.981,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000,00
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.635.600,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.635.600,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00

V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.284.700,00
1	Pengadaan Mebel	0,00
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.284.700,00
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.028.589.900,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	411.286.400,00
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.435.500,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	604.868.000,00
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.700.000,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.000.000,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.700.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00
B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.308.786.500,00
I	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.308.786.500,00
1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	0,00
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	0,00
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0,00
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	70.000.000,00
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100.250.000,00
6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	285.936.500,00
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	40.000.000,00
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	35.000.000,00
9	Penagihan Pajak Daerah	2.500.000.000,00
10	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10.000.000,00
11	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	30.000.000,00
12	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	237.600.000,00
	Total Anggaran	16.209.591.681,00

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi. Pada bab ini disajikan pula data umum organisasi yang meliputi personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan.

2. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang meliputi tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Pada bab ini disajikan pula rencana kinerja yang meliputi program dan kegiatan tahun 2021, serta disajikan pula perjanjian kinerja tahun 2021 mulai pejabat tertinggi sampai staf.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai capaian kinerja organisasi tahun 2021, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir RPJMD dan dengan realisasi nasional. Disajikan pula analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan dan analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya serta realisasi anggaran tahun 2021.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan mengenai perencanaan dan akuntabilitas kinerja organisasi tahun 2021. Dalam bab ini disajikan pula permasalahan dan solusi yang ditempuh beserta saran untuk perbaikan perencanaan dan akuntabilitas kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 memiliki tujuan adalah:

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan, serta Prioritas Pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dan Perencanaan Anggaran berjalan;
3. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah terpadu antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Rencana Strategis yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah :

**”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan
Berdaya Saing”**

Visi sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan visi dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Dengan kata lain Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi sesuai visi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visinya tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi

Pemenuhan Pelayanan Publik”

Misi sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan misi ke 4 (empat) dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

3. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, perlu ditetapkan tujuan (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sementara itu, Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (*goal*) serta dapat memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**”Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
Terhadap Pendapatan Daerah”**

4. Sasaran

Sasaran pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka pendek (1 tahun). Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Disamping itu, sasaran juga merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik Pemerintah.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan selama sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai adalah :

“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan pertahun sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Penerimaan PAD	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$	100%
	Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak	$\frac{\text{Jml WP Th Skrg} - \text{Jml WP Th sblmnya}}{\text{Jml WP Tahun Sblmnya}}$	0,6%
	Nilai IKM	Nilai IKM	81,25

B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Proses penyusunan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2021 dimulai sejak tahun 2020 yang mendasarkan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Rencana Kinerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Internal yang Terlayani dengan Baik	% Unit Internal yang Terlayani
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi PD yang tersusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Evaluasi yang tersusun
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	Jumlah Gaji ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum yang terpenuhi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Jumlah Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya bahan peralatan rumah tangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya bahan logistik kantor	Jumlah pengadaan ATK
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penggadaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan baik	Persentase terselenggarakannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah
Pengadaan Mebel	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan Kantor
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan Kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terbayarkan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Baik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan Baik	Jumlah penyediaan Jasa Perlengkapan kantor

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas atau Operasional perorangan dengan Baik	Jumlah pemeliharaan untuk Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas atau Operasional lapangan dengan Baik	Jumlah pemeliharaan, perijinan kendaraan dinas opsasional atau lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Baik	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan Baik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Jumlah Peningkatan Pajak Dasar Penetapan
		Jumlah Peningkatan Pajak Dasar Pelaporan
		% Target PAD Tahun Berjalan
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengendalian serta Tersedianya Sarana Prasarana Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penilaian yang Tersusun
		Jumlah Jenis Pelayanan dan Sarana Prasarana Pajak Daerah yang Tersedia
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian yang Tersusun
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pajak Daerah	Persentase terlaksananya studi orientasi
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersusunnya Dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah	Jumlah SOP Pajak Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terselenggaranya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana Prasarana Pajak Daerah	Jumlah sarana prasarana pajak daerah yang tersedia
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersusunnya database obyek pajak daerah	Jumlah Pendataan Subyek/Obyek Pajak
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tersusunnya Dokumen Penilaian PBB dan BPHTB	Jumlah tercetaknya blanko PBB-P2
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terselenggaranya pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah aplikasi pelayanan yang tersedia
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersusunnya Data PeLaporan Pajak Daerah	Jumlah laporan pajak daerah yang tersusun
Penagihan Pajak Daerah	Tersusunnya laporan penagihan pajak daerah	Jumlah Intensifikasi Pajak Air Tanah, Reklame dan PBB
		Jumlah Bantuan Transport Penyisiran PBB
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselesaikanya permohonan keberatan	Jumlah jenis keberatan yang ditangani
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah laporan pengawasan dan pemeriksaan yang tersusun
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersusunnya Laporan Pembinaan dan Pengawasan retribusi daerah	Jumlah OPD Penghasil Pendapatan Daerah yang dievaluasi
		Jumlah pengawas (cheker)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja tahun 2021 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (*cascading*) menjadi kinerja seluruh unit dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pada level Kepala Badan (Eselon 2) berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup sasaran, indikator kinerja, dan target sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	% Realisasi PAD	100%
		% Peningkatan Jumlah Wajib Pajak	0,6%
		Nilai IKM	81,25

Penandatanganan perjanjian kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan pada bulan Januari 2021, yang isinya merupakan penjabaran dari IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Adapun Perjanjian Kinerja untuk eselon III sampai dengan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Eselon III
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2021

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi PD yang tersusun	6 dokumen	Sekretaris
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	4 laporan	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	-	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terpenuhi	100%	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	5 jenis	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terbayarkan	100%	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	77 unit	
8	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penilaian yang Tersusun	4 dokumen	Kabid Perencanaan dan Penetapan
		Jumlah Jenis Pelayanan dan Sarana Prasarana Pajak Daerah yang Tersedia	15 jenis	Kabid Pelayanan dan Penagihan
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian yang Tersusun	8 laporan	Kabid Pengawasan dan Pelaporan

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Eselon IV
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2021

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket
I Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyuluhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	2 dokumen	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun	4 dokumen	
II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	43 orang	Kasubag Keuangan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	3 Laporan	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	3 Laporan	
III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakalan dinas dan perlengkapannya	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	
IV Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17 jenis	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	-	

3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengadaan ATK	42 jenis	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan pengandaan	14 cetakan, 21 jenis	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 surat kabar	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	-	
V Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	-	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor	2 jenis	
VI Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 jenis	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan yang tersedia	2 jenis	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga honoerer/tenaga pengamanan/sopir yang menerima gaji/honor	26 orang	
VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah STNK yang terlunasi	5 mobil dinas, 19 sepeda motor	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5 mobil dinas, 19 sepeda motor	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	21 unit PC, 11 laptop, 29 unit printer	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 gedung kantor	

VIII Pengelolaan Pendapatan Daerah				
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pajak daerah yang tersusun	2 dokumen	Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen analisa potensi dan kebijakan pajak daerah yang tersusun	2 dokumen	
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil penyuluhan pajak daerah yang tersusun	3 laporan	
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak yang telah dilakukan penilaian baik massal maupun individual	4 jenis pelayanan	Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah jenis pelayanan yang tersedia	4 laporan	Kasubbid Penetapan
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana prasarana pajak daerah yang tersedia	11 jenis pajak daerah	Kasubbid Pelayanan dan Konsultasi
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi pajak daerah yang tersusun	4 laporan	
8	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah berkas keberatan pajak daerah yang terselesaikan	4 LHP	Kasubbid Penagihan
9	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) pajak daerah yang tersusun	4 laporan	Kasubbid Penyelesaian Keberatan dan Banding
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil penagihan pajak daerah yang tersusun	50 berkas	Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan
11	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan pengawasan retribusi daerah yang tersusun	4 jenis pelayanan	Kasubbid Pengawasan dan Pemeriksaan
12	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah obyek pajak yang telah dilakukan penilaian baik massal maupun individual	4 laporan	Kasubbid Evaluasi dan Pengendalian

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1) Pencapaian Kinerja

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja digunakan instrument pengukuran ordinal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, dan hasil. Skala pengukuran kinerja sebagai berikut:

- 85 – 100 = Sangat baik/sangat berhasil ;
- 70 - < 85 = Baik/berhasil ;
- 55 - < 70 = Kurang baik/kurang berhasil ;
- < 55 = Sangat kurang baik/tidak berhasil.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan

penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Berikut disajikan hasil Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan
Tahun 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI				Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	% Penerimaan PAD	100%	17,65%	41,52%	68,80%	134,68%	134,68%	134,68%
		% Peningkatan Jumlah Wajib Pajak	0,60%	0,37%	0,48%	0,56%	0,99%	0,99%	165,00%
		Nilai IKM	81,25	-	-	-	83,7	83,7	103,02%
	Rata-rata								134,23%

Berdasarkan tabel 3.1. di atas, rata-rata capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebesar 134,37%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan telah tercapai dengan kategori Sangat Baik.

Evaluasi dan analisis secara rinci terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja ke 1 (Satu): % Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2021 tercapai 134,68% di atas target yang ditetapkan sebesar 100%. Dari sektor pajak daerah terealisasi sebesar 97,68%, dari sektor retribusi daerah sebesar 85,79%, dari sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 95,74%, dan dari sektor Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 156,70%.

Penerimaan dari masing-masing sektor tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pada sektor Pajak Daerah Tahun 2021 hanya terealisasi sebesar 97,68%.

Dari 11 jenis pajak daerah, terdapat 6 jenis pajak daerah yang memenuhi target, yakni pajak Hotel terealisasi sebesar 103,65%, Pajak Reklame sebesar 105,58%, Pajak Penerangan Jalan sebesar 104,85%, Pajak Air Tanah sebesar 117,72%, PBB-P2 sebesar 101,45%, dan BPHTB sebesar 105,86%, sedangkan 5 jenis pajak daerah lainnya tidak tercapai. Beberapa jenis pajak daerah yang tidak tercapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pajak Restoran;

Pajak restoran terealisasi sebesar 80,61%. Tidak tercapainya target Pajak restoran karena adanya batasan-batasan yang diberlakukan pemerintah untuk mengatasi penyebaran Virus Covid-19, misalnya : pemberlakuan jam buka usaha restoran, sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak restoran.

2) Pajak Hiburan;

Pajak hiburan hanya terealisasi sebesar 32,63%. Tidak tercapainya target pajak hiburan disebabkan banyaknya usaha hiburan yang tutup karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada menurunnya penerimaan pajak hiburan.

3) Pajak Parkir;

Pajak Parkir hanya terealisasi sebesar 79,55%. Tidak tercapainya target pajak parkir disebabkan adanya batasan-batasan yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap tempat-tempat usaha untuk mengatasi penyebaran Virus Covid-19, misalnya : restoran dan tempat hiburan, sehingga berakibat menurunnya penerimaan pajak parkir.

4) Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak sarang burung walet hanya terealisasi sebesar 23,75%. Tidak tercapainya target pajak sarang burung walet karena banyaknya usaha burung walet yang telah tutup, sehingga target pajak daerah yang ditetapkan sudah tidak sesuai dengan potensi yang ada.

5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak mineral bukan logam dan batuan hanya terealisasi sebesar 33,81%. Tidak tercapainya target pajak mineral bukan logam dan batuan disebabkan menurunnya pembayaran pajak sebagai akibat masih banyak pengusaha tambang yang belum memperpanjang masa ijin tambang, sehingga mempengaruhi aktifitas penambangan.

b. Pada sektor Retribusi Daerah Tahun 2021 hanya terealisasi sebesar 85,79%.

Realisasi retribusi daerah yang tidak mencapai target tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum;

Retribusi jasa umum terealisasi sebesar 93,68%. Tidak tercapainya target Retribusi ini karena tidak tercapainya penerimaan dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yakni hanya terealisasi 92,44%, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor hanya terealisasi 85,34%.

2) Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi jasa usaha terealisasi sebesar 83,24%. Tidak tercapainya target Retribusi ini karena rendahnya penerimaan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, masing-masing sebesar 88,01%, 73,83% dan 75,38%.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu terealisasi sebesar 56,89%. Tidak tercapainya target retribusi ini karena tidak tercapainya penerimaan dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yakni hanya terelisasi sebesar 51,39% dan Retribusi Perpanjangan IMTA sebesar 72,61%.

c. Pada Sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya terealisasi sebesar 95,74%. Tidak tercapainya penerimaan ini karena rendahnya penerimaan dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD yang hanya terealisasi sebesar 87,42%

Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2021

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA
I	PAJAK DAERAH	137.595.722.312,00	134.404.544.416,00	97,68	3.191.177.896,00
1	Pajak Hotel	1.300.000.000,00	1.347.453.391,00	103,65	(47.453.391,00)
2	Pajak Restoran	6.740.000.000,00	5.432.940.199,00	80,61	1.307.059.801,00
3	Pajak Hiburan	5.120.507.215,00	1.671.046.211,00	32,63	3.449.461.004,00
4	Pajak Reklame	2.500.000.000,00	2.639.464.926,00	105,58	(139.464.926,00)
5	PPJ	53.000.000.000,00	55.572.123.456,00	104,85	(2.572.123.456,00)
6	Pajak Parkir	1.050.000.000,00	835.317.000,00	79,55	214.683.000,00
7	Pajak Air Tanah	550.000.000,00	647.437.561,00	117,72	(97.437.561,00)
8	Pajak Sarang Burung	6.000.000,00	1.425.000,00	23,75	4.575.000,00
9	Pajak Minerba	4.329.215.097,00	1.463.844.900,00	33,81	2.865.370.197,00
10	PBB-P2	43.000.000.000,00	43.622.225.888,00	101,45	(622.225.888,00)
11	BPHTB	20.000.000.000,00	21.171.265.884,00	105,86	(1.171.265.884,00)
II	RETRIBUSI DAERAH	16.669.687.900,00	14.300.774.860,00	85,79	2.368.913.040,00
1	Retribusi Jasa Umum	10.882.656.600,00	10.194.961.050,00	93,68	687.695.550,00
2	Retribusi Jasa Usaha	3.087.031.300,00	2.569.729.147,00	83,24	517.302.153,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	2.700.000.000,00	1.536.084.663,00	56,89	1.163.915.337,00
III	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	20.029.376.958,00	19.176.236.923,05	95,74	853.140.034,95
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.883.000.000,00	4.949.399.687,75	101,36	(66.399.687,75)
2	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	15.146.376.958,00	14.226.837.235,30	93,93	919.539.722,70
IV	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	303.703.523.870,00	475.904.872.308,11	156,70	(172.201.348.438,11)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	236.880.000,00	193.736.200,00	81,79	43.143.800,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	240.000.000,00	46.516.690.636,17	19.381,95	(46.276.690.636,17)
3	Hasil Kerjasama Daerah	289.650.000,00	289.650.000,00	100,00	-
4	Jasa Giro	1.500.000.000,00	926.015.003,72	61,73	573.984.996,28
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	23.004.230,00	-	(23.004.230,00)
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	9.600,00	-	(9.600,00)
8	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.409.493.869,62	-	(1.409.493.869,62)
9	Pendapatan dari BLUD	227.500.000.000,00	365.561.009.209,60	160,69	(138.061.009.209,60)
10	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.409.493.870,00	0,00	0,00	1.409.493.870,00
11	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	72.500.000.000,00	60.985.263.559,00	84,12	11.514.736.441,00
	TOTAL	477.998.311.040,00	643.786.428.507,16	134,68	(165.788.117.467,16)

2. Indikator Kinerja ke 2 (Dua) : % Peningkatan Jumlah Wajib Pajak

Kinerja peningkatan jumlah wajib pajak tahun 2021 terealisasi sebesar 0,99% dari target sebesar 0,6%, atau tercapai sebesar 165,4%. Secara rinci jumlah wajib pajak pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Jumlah Wajib Pajak
Tahun 2021

No.	Jenis Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak		Naik (Turun)	
		Tahun 2021	Tahun 2020	WP	%
1	Pajak Hotel	31	37	6	-16,22
2	Pajak Restoran	158	176	-18	-10,23
3	Pajak Hiburan	12	15	-3	-20,00
4	Pajak Reklame	309	344	-35	-10,17
5	Pajak Parkir	26	27	-1	-3,70
6	Pajak Penerangan Jalan	19	17	2	11,76
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15	14	1	7,14
8	Pajak Air Tanah	79	76	3	3,95
9	Pajak Sarang Burung Walet	3	10	-7	-70,00
10	PBB-P2	820.120	812.220	7.900	0,97
11	BPHTB	5.572	5.288	284	5,37
	JUMLAH	826.344	818.224	8.120	0,99%

Dari tabel di atas terlihat jumlah wajib pajak pada tahun 2021 sebesar 826.344 wajib pajak. Bila dibanding dengan tahun 2020 jumlah wajib pajak sebesar 818.224 wajib pajak. Berarti ada kenaikan sebesar 8.120 wajib pajak atau sebesar 0,99%.

3. Indikator Kinerja ke 3 (Tiga) : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (*public services*) sangat strategis karena akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis seiring dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari *empowering* yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan berusaha mewujudkan kualitas pelayanan publik (*public service*) secara terpadu, terprogram, terarah dan konsisten sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara cepat, tepat, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

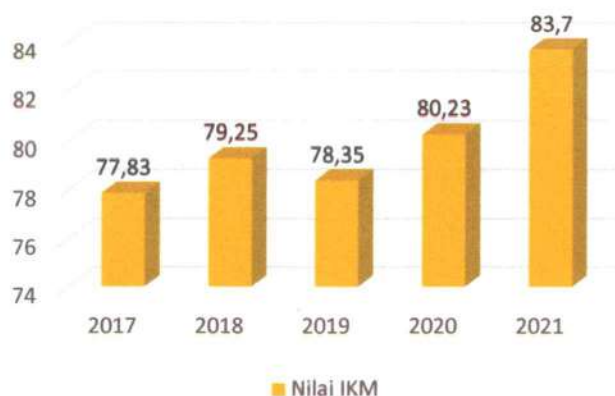
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN No. 16 tahun 2014).

Hasil survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan nilai sebesar 80,23 atau dengan nilai Baik dari target yang ditetapkan sebesar 80. Ini berarti capaian kinerja dari indikator nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) tercapai sebesar 100,29%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Namun demikian, ke depan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan akan terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Diantaranya pelayanan pembayaran PBB secara online kerja sama dengan Bank Jatim melalui *internet banking* dan *mobile banking*, sehingga memudahkan masyarakat atau wajib pajak membayar tagihan dimana saja tanpa perlu datang ke tempat pembayaran. Disamping itu juga Badan Pendapatan Daerah berencana membuat aplikasi pelaporan SPTPD secara online, sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPTPD tanpa harus datang ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Perkembangan nilai survey kepuasan masyarakat tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 3.1
Grafik Nilai IKM Tahun 2017-2021



2) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

No.	SASARAN	INDIKATOR	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi Tahun Sebelumnya					Selisih
					2017	2018	2019	2020	Rata-rata	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (5-10)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	% Realisasi Penerimaan PAD	100,00%	132,50%	98,27%	88,05%	91,27%	99,62%	94,30%	38,20%
		% Peningkatan Jumlah Wajib Pajak	0,60%	0,99%	0,60%	0,72%	0,78%	0,83%	0,73%	0,26%
		Nilai IKM	81,25	83,70	77,83	79,25	78,35	80,23	80,10	3,60

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan rata-rata realisasi kinerja tahun sebelumnya terdapat

kenaikan pada semua indikator kinerja. Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penerimaan PAD naik sebesar 38,20%, Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak naik sebesar 0,26%, dan Indikator Nilai IKM naik sebesar 3,60.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode RPJMD/Renstra.

Realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 bila dibandingkan dengan target sampai dengan akhir periode RPJMD/Renstra bisa dilihat pada tabel berikut berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD/Renstra

No.	SASARAN	INDIKATOR	Target 2021	Realisasi 2021	Target Akhir Periode RPJMD/Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7 = (5/6)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	% Realisasi Penerimaan PAD	100,00%	132,50%	100,00%	132,50%
		% Peningkatan Jumlah Wajib Pajak	0,60%	0,99%	0,60%	165,00%
		Nilai IKM	81,25	83,70	81,25	103,02%
	Rata-rata					133,51%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD/Renstra bisa dikatakan berhasil dengan rata-rata tingkat kemajuan 133,51%. Indikator kinerja Persentase Realisasi Penerimaan PAD terdapat tingkat kemajuan sebesar

132,50%, untuk Indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak melampaui target kinerja dengan tingkat kemajuan 165 %, dan untuk Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdapat tingkat kemajuan sebesar 103,02%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Untuk membandingkan capaian kinerja dengan realisasi nasional dilakukan dengan membandingkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah atau yang lebih dikenal dengan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Lamongan dengan Rata-Rata Nasional. Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan.

Pada tabel berikut disajikan Realisasi Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Lamongan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 :

Tabel 3.6
Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Lamongan
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Pendapatan Asli Daerah	429.200.063.876,82	436.595.179.671,02	472.002.823.163,86	483.583.044.116,57	643.786.428.507,15	493.033.507.867,08
Total Pendapatan	2.716.042.671.044,82	2.811.062.543.333,02	2.864.496.711.416,86	2.974.914.693.684,05	2.969.805.169.673,16	2.867.264.357.830,38
Derajat Desentralisasi Fiskal	15,80%	15,53%	16,48%	16,26%	21,68%	17,15%

Dari tabel tersebut terlihat realisasi derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 sebesar 21,68%, sedangkan rata-rata selama 5 tahun sebesar 17,15%.

Selanjutnya Realisasi Derajat Desentralisasi Fiskal secara nasional sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Derajat Desentralisasi Fiskal Secara Nasional
Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun					Rata-rata
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Derajat Desentralisasi Fiskal Secara Nasional	9,80%	10,66%	11,01%	11,31%	12,87%	11,13%

Sumber : www.BPS.go.id

Dari tabel tersebut terlihat realisasi derajat desentralisasi fiskal secara nasional pada tahun 2020 sebesar 12,87%, sedangkan rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 11,13%.

Apabila dibandingkan capaian kinerja Kabupaten Lamongan tahun 2021 dengan realisasi nasional sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Dengan Realisasi Nasional

No.	Uraian	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi Nasional	Selisih
1	2	3	4	5	6 = (4-5)
1	Derajat Desentralisasi Fiskal	17,00%	21,68%	12,87%	8,81%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Lamongan tahun 2021 sebesar 21,68% sedangkan realisasi nasional sebesar 12,87% atau ada selisih sesesar 8,81%.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan yang telah dilakukan

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian indikator sasaran dan keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas antara lain :

1. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah;
2. Kompetensi pegawai yang terus menerus ditingkatkan;
3. Penerapan teknologi informasi dalam menunjang setiap aktivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Adanya regulasi yang jelas terkait pendapatan daerah;
5. Semakin meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan harus mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (*cost per outcome*).

Tujuan dari *Cost per Outcome* adalah menunjukan keterkaitan anggaran berbasis kinerja, yang merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Perhitungan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kineja	Realisasi Anggaran	Efisiensi
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	% Realisasi PAD	134,68%	82,01%	
	% Peningkatan Jumlah Wajib Pajak	165,00%		
	Nilai IKM	103,02%		
		134,23%	82,01%	52,22%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, yakni meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai sebesar 52,22%.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja

Terdapat 2 program, 8 kegiatan dan 34 Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja. Pada tabel 3.10 dan tabel 3.11 menyajikan capaian kinerja program dan kinerja kegiatan tahun 2021.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Program
Tahun 2021

No.	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	% Unit Internal yang Terlayani dengan Baik	100%	100%	100%	12.900.805.181	10.039.811.403	77,82%
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	% Peningkatan Pajak Dasar Penetapan	5,00%	4,60%	91,95%	3.308.786.500	3.253.783.070	98,34%
		% Peningkatan Pajak Dasar Pelaporan	5,00%	3,91%	78,29%			
		% Target PAD Tahun Berjalan	100%	132,50%	132,50%			
					100,91%			
	Rata-Rata Kinerja				100,46%			88,08%

Dari tabel capaian kinerja program di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja program adalah sebesar 100,46%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tercapai sebesar 100% dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah tercapai sebesar 100,91%. Adapun realisasi anggaran sebesar 88,08%.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Kegiatan
Tahun 2021

No.	KEGIATAN	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	70.000.000,00	69.959.950,00	99,94%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	100,00%	11.474.594.981,00	8.739.602.782,00	76,16%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100,00%	140.635.600,00	128.827.800,00	91,60%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 jenis	6 jenis	100,00%	27.284.700,00	26.977.400,00	98,87%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00%	1.028.589.900,00	922.740.671,00	89,71%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 unit	83 unit	100,00%	159.700.000,00	151.702.800,00	94,99%
8	Pengeloaan Pendapatan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	3.308.786.500,00	3.253.783.070,00	98,34%
		15 jenis	15 jenis				
		8 laporan	8 laporan				
	Rata-rata			100,00%			92,80%

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja kegiatan tercapai sebesar 100% dan realisasi anggran sebesar 92,80%, sehingga terdapat tingkat efisiensi sebesar 7,20%.

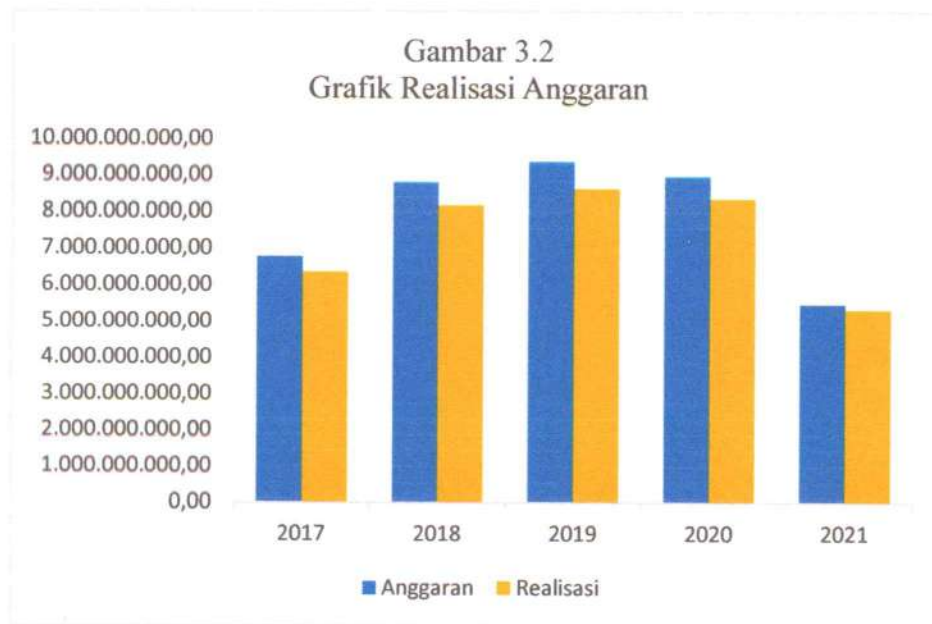
Selanjutnya untuk capaian kinerja sub kegiatan sebagaimana table 3.12 di bawah, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 84,69%, sehingga terdapat tingkat efisiensi sebesar 15,31%.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sub Kegiatan
Tahun 2021

No.	SUB KEGIATAN	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyuluhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	40.000.000,00	39.959.950,00	99,90%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang	43 orang	100,00%	11.434.594.981,00	8.699.629.982,00	76,08%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 dokumen	100,00%	20.000.000,00	19.972.850,00	99,86%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 dokumen	100,00%	20.000.000,00	19.999.950,00	100,00%
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17 jenis	17 jenis	100,00%	10.000.000,00	8.398.500,00	83,99%
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42 jenis	42 jenis	100,00%	75.635.600,00	70.657.300,00	93,42%
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14 cetakan, 21 jenis	14 cetakan, 21 jenis	100,00%	40.000.000,00	35.947.000,00	89,87%
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 surat kabar	12 surat kabar	100,00%	15.000.000,00	13.825.000,00	92,17%
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	-
14	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 jenis	7 jenis	100,00%	27.284.700,00	26.977.400,00	98,87%
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	3 jenis	100,00%	411.286.400,00	391.571.181,00	95,21%
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 jenis	2 jenis	100,00%	12.435.500,00	9.517.300,00	76,53%
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 orang	24 orang	100,00%	604.868.000,00	521.652.190,00	86,24%
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Mobil Dinas, 19 sepeda motor	4 Mobil Dinas, 19 sepeda motor	100,00%	10.000.000,00	4.869.600,00	48,70%
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 mobil dinas, 19 sepeda motor	5 mobil dinas, 19 sepeda motor	100,00%	125.000.000,00	123.453.200,00	98,76%
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19 unit PC, 26 unit printer, 10 laptop	19 unit PC, 26 unit printer, 10 laptop	100,00%	24.700.000,00	23.380.000,00	94,66%
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-
23	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
24	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
25	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
26	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11 jenis pajak daerah	11 jenis pajak daerah	100,00%	70.000.000,00	69.823.000,00	99,75%
27	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	11 jenis pajak daerah	11 jenis pajak daerah	100,00%	100.250.000,00	97.130.000,00	96,89%
28	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	900.000 WP	900.000 WP	100,00%	285.936.500,00	284.655.000,00	99,55%
29	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 aplikasi	1 aplikasi	100,00%	40.000.000,00	39.700.000,00	99,25%
30	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 laporan	4 laporan	100,00%	35.000.000,00	30.690.000,00	87,69%
31	Penagihan Pajak Daerah	27 kecamatan 820.000 WP	27 kecamatan 820.000 WP	100,00%	2.500.000.000,00	2.494.185.070,00	99,77%
32	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	11 jenis pajak daerah	11 jenis pajak daerah	100,00%	10.000.000,00	0,00	0,00%
33	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	11 jenis pajak daerah	11 jenis pajak daerah	100,00%	30.000.000,00	0,00	0,00%
34	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	25 OPD 17 org	25 OPD 17 org	100,00%	237.600.000,00	237.600.000,00	100,00%
Rata-rata				100,00%			84,69%

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar sebesar Rp. 13.293.594.473,00 atau mencapai 82,01% dari total pagu Rp. 16.209.591.681,00. Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode tahun 2017-2021 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut :



Adapun realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2021

URAIAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.900.805.181,00	10.039.811.403,00	77,82
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000,00	69.959.950,00	99,94
Penyuluhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000,00	39.959.950,00	99,90
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.474.594.981,00	8.739.602.782,00	76,16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.434.594.981,00	8.699.629.982,00	76,08
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000,00	19.972.850,00	99,86
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000,00	19.999.950,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.635.600,00	128.827.800,00	91,60
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	8.398.500,00	83,99
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.635.600,00	70.657.300,00	93,42
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	35.947.000,00	89,87
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	13.825.000,00	92,17
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.284.700,00	26.977.400,00	98,87
Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.284.700,00	26.977.400,00	98,87
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.028.589.900,00	922.740.671,00	89,71
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	411.286.400,00	391.571.181,00	95,21
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.435.500,00	9.517.300,00	76,53
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	604.868.000,00	521.652.190,00	86,24
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.700.000,00	151.702.800,00	94,99
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000,00	4.869.600,00	48,70
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.000.000,00	123.453.200,00	98,76
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.700.000,00	23.380.000,00	94,66
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.308.786.500,00	3.253.783.070,00	98,34
Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.308.786.500,00	3.253.783.070,00	98,34
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	0,00	0,00	0,00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	70.000.000,00	69.823.000,00	99,75
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100.250.000,00	97.130.000,00	96,89
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	285.936.500,00	284.655.000,00	99,55
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	40.000.000,00	39.700.000,00	99,25
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	35.000.000,00	30.690.000,00	87,69
Penagihan Pajak Daerah	2.500.000.000,00	2.494.185.070,00	99,77
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	237.600.000,00	237.600.000,00	100,00
JUMLAH	16.209.591.681,00	13.293.594.473,00	82,01

Adapun rincian penggunaan anggaran yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00, yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen-dokumen perencanaan. Adapun realisasi keuangan dan fisik sebesar 100%;

- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00, yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen evaluasi kinerja. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,94% dan fisik sebesar 100%.

b. Administrasi Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.434.594.981,00, yang dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN Bapenda. Adapun realisasi keuangan sebesar 76,08% dan fisik sebesar 100%;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00, yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,86% dan fisik sebesar 100%;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00, yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran. Adapun realisasi keuangan dan fisik sebesar 100%.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00, yang

dipergunakan untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar 83,99% dan fisik sebesar 100%;

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.635.600,00, yang dipergunakan untuk penyediaan alat tulis kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar 93,42% dan fisik sebesar 100%;

3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 yang dipergunakan untuk pengadaan barang cetak/penggandaan (14 cetakan), Adapun realisasi keuangan sebesar 89,87% dan fisik sebesar 100%;

4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 yang dipergunakan untuk pengadaan bahan bacaan (12 surat kabar), Adapun realisasi keuangan sebesar 92,17% dan fisik sebesar 100%.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah dengan sub kegiatan:

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.284.700,00 yang dipergunakan untuk pembelian 2 (dua) unit AC, Adapun realisasi keuangan sebesar 98,87% dan fisik sebesar 100%.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 411.286.400,00 yang dipergunakan untuk pembayaran rekening listrik dan internet, Adapun realisasi keuangan sebesar 95,21% dan fisik sebesar 100%;
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.435.500,00 yang dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan rumah tangga. Adapun realisasi keuangan sebesar 76,53% dan fisik sebesar 100%;
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 604.868.000,00 yang dipergunakan untuk pembayaran gaji tenaga honorer sebanyak 26 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar 86,24% dan fisik sebesar 100%.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 yang dipergunakan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (20 sepeda motor dan 5 mobil). Adapun realisasi keuangan sebesar 48,7% dan fisik sebesar 100%;

- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000,00 yang dipergunakan untuk service kendaraan bermotor dan pembelian BBM (20 sepeda motor dan 5 mobil). Adapun realisasi keuangan sebesar 98,76% dan fisik sebesar 100%;
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.700.000,00 yang dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan kantor (20 unit PC, 28 unit printer, dan 10 laptop). Adapun realisasi keuangan sebesar 94,66% dan fisik sebesar 100%;
- g. Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan:
- a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,00 yang dipergunakan untuk pengadaan blanko SSPD BPHTB sebanyak 600 buku. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,75% dan fisik sebesar 100%;
 - b) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.250.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen Zona Nilai Tanah di Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar 96,89% dan fisik sebesar 100%;
 - c) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

- (BPHTB), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 285.936.500,00 yang dipergunakan untuk pencetakan SPPT dan DHKP PBB. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,55% dan fisik sebesar 100%;
- d) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 yang dipergunakan untuk pemeliharaan aplikasi pendapatan online. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,25% dan fisik sebesar 100%;
- e) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan laporan pajak daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar 87,69% dan fisik sebesar 100%;
- f) Penagihan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00 yang dipergunakan untuk penysisiran PBB di Desa-Desa se Kab. Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,77% dan fisik sebesar 100%;
- g) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan laporan penyelesaian keberatan pajak daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar 0,00%. Tidak terserapnya pagu anggaran pada sub kegiatan ini karena ada pembatasan penyerapan untuk belanja perjalanan dinas. Namun secara fisik sub kegiatan ini telah terealisasi 100%;

- h) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan laporan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar 0,00%. Tidak terserapnya pagu anggaran pada sub kegiatan ini karena ada pembatasan penyerapan untuk belanja perjalanan dinas. Namun secara fisik sub kegiatan ini telah terealisasi 100%;
- i) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 237.600.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen pembinaan dan pengawasan retribusi daerah serta pembayaran gaji petugas cheker sebanyak 18 orang. Adapun realisasi baik keuangan maupun fisik sebesar 100%;

BAB IV

PENUTUP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dibidang pendapatan daerah. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Sasaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 yakni Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai sebesar 134,23%. Untuk Indikator Persentase Realisasi Penerimaan PAD tercapai sebesar 134,68%, Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak tercapai sebesar 165,00%, dan Indikator Nilai IKM tercapai sebesar 103,02%. Adapun untuk kinerja realisasi anggaran sebesar 82,01%.
2. Capaian kinerja program Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 rata-rata tercapai sebesar 100,46%. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tercapai sebesar 100%, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah tercapai sebesar 100,91%. Adapun untuk kinerja realisasi anggaran tercapai sebesar 88,08%.

3. Capaian kinerja kegiatan rata-rata tercapai sebesar 100% Sedangkan Capaian kinerja sub kegiatan tercapai sebesar 100% dengan kinerja realisasi anggaran masing-masing sebesar 92,80%.sebesar 84,69%.

B. Saran

Beberapa langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja ke depan antara lain :

- a. Meningkatkan sosialisasi secara intens baik melalui media cetak maupun elektronik;
- b. Meningkatkan kualitas SDM Badan Pendapatan Daerah melalui Pelatihan/Bimbingan Teknis yang terkait pajak daerah.
- c. Melakukan pemutakhiran data (*updating data*) obyek/subyek pajak daerah.
- d. Meningkatkan efektivitas penagihan dan pemeriksaan pajak daerah.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.
- f. Melakukan pendataan ulang wajib pajak dan penggalian potensi-potensi baru.

Sebagai bagian penutup, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan capaian kinerja pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2020**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. MOCH WAHYUDI, M.M
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : DR.YUHRONUR EFENDI, MBA
Jabatan : Bupati Lamongan
selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI LAMONGAN

DR.YUHRONUR EFENDI, MBA

Lamongan, Mei 2021
Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. MOCH WAHYUDI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19661004 199503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	% Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100 %
		% Peningkatan Jumlah Wajib Pajak	0,6%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25

	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 13.454.233.274,00	APBD
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 4.084.926.800,00	APBD

BUPATI LAMONGAN

DR.YUHRONUR EFENDI, MBA

Lamongan, Mei 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. MOCH WAHYUDI, M.M

Pembiha Utama Muda
NIP. 19661004 199503 1 002